

## PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DESA SEBAGAI PUSAT LITERASI BAHASA BAGI MASYARAKAT DESA

Arni Mahyudi

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

[mahyudiarnnee@gmail.com](mailto:mahyudiarnnee@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstract

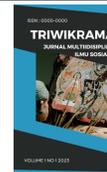
Tingkat literasi bahasa masyarakat desa masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh minimnya akses terhadap bahan bacaan serta belum optimalnya fungsi perpustakaan desa sebagai pusat literasi. Padahal, perpustakaan desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan nonformal, dan kegiatan literasi yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran serta strategi pemberdayaan perpustakaan desa dalam meningkatkan literasi bahasa masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Subjek penelitian meliputi pengelola perpustakaan, perangkat desa, serta masyarakat pengguna perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan desa mulai menunjukkan peran sebagai pusat literasi bahasa, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengelola profesional, dan minimnya partisipasi masyarakat. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui kolaborasi dengan perangkat desa, pengadaan koleksi buku yang relevan, dan pelatihan literasi dasar bagi warga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran perpustakaan desa secara sistematis agar dapat menjadi pusat literasi yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Perpustakaan Desa, Literasi Bahasa

### Abstract

*The level of language literacy among rural communities remains relatively low, primarily due to limited access to reading materials and the suboptimal function of village libraries as literacy centers. In fact, village libraries hold significant potential to enhance community literacy through the provision of information, non-formal education, and structured literacy activities. This study aims to describe and analyze the role and empowerment strategies of village libraries in improving language literacy among the community. A descriptive qualitative approach was employed, with the research conducted in the Hulu Sungai Selatan Regency. Research subjects included library administrators, village officials, and local residents who utilize the library. The findings reveal that the village library has begun to demonstrate its role as a language literacy center, although it still faces challenges such as limited facilities, a lack of professional staff, and low community participation. Empowerment efforts have been undertaken through collaboration with village authorities, the provision of relevant book collections, and basic literacy training for residents. The study recommends the systematic strengthening of the village library's role to ensure its effectiveness and sustainability as a community literacy center.*

**Keywords:** Empowerment, Village Library, Language Literacy



---

## A. Latar Belakang Masalah

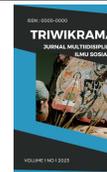
Literasi bahasa merupakan salah satu keterampilan fundamental yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan berbahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, menjadi alat utama dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, memahami pesan, dan membentuk pola pikir kritis serta kreatif. Dalam konteks masyarakat, literasi bahasa tidak hanya mendukung perkembangan individu secara personal, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu komunitas.

Dalam beberapa kondisi tingkat literasi di berbagai daerah terutama di pedesaan, masih tergolong rendah. Kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, minimnya fasilitas pendidikan nonformal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membaca dan menulis menjadi faktor utama penghambat peningkatan literasi bahasa. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, rendahnya kemampuan menyerap informasi publik, hingga kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi bahasa di tingkat desa adalah keberadaan perpustakaan desa. Perpustakaan desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi dapat diberdayakan menjadi pusat kegiatan literasi yang aktif dan inklusif. Melalui program-program yang tepat sasaran, perpustakaan desa dapat menjadi ruang belajar bersama, wadah diskusi, pelatihan bahasa, dan pengembangan keterampilan literasi lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan perpustakaan desa sebagai pusat literasi bahasa merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di pedesaan. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan literasi, masyarakat tidak hanya diberi akses terhadap informasi, tetapi juga difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta membentuk budaya literasi yang berkelanjutan.

Minat baca dan tingkat literasi bahasa di wilayah pedesaan masih tergolong rendah, menjadi persoalan serius yang berdampak pada lambatnya kemajuan pendidikan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang layak, minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan yang aktif, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, menyampaikan ide secara efektif, maupun menanggapi perubahan sosial dan teknologi menjadi terbatas. Padahal, literasi bahasa merupakan fondasi utama dalam pembentukan kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, serta partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu upaya strategis untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberdayakan perpustakaan desa agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan kegiatan literasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Melalui perpustakaan desa yang diberdayakan secara optimal, masyarakat pedesaan dapat diberikan ruang dan fasilitas untuk meningkatkan minat baca, kemampuan berbahasa, dan keterampilan literasi lainnya.

Perpustakaan desa memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan literasi masyarakat, terutama dalam hal penguatan kemampuan berbahasa yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Di tengah tantangan rendahnya minat baca dan keterbatasan akses informasi di wilayah pedesaan, perpustakaan desa dapat berperan sebagai pusat sumber belajar yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya menyediakan koleksi bahan bacaan, perpustakaan desa juga dapat menjadi ruang interaksi sosial yang mendukung tumbuhnya budaya literasi melalui berbagai program seperti kelas



membaca, pelatihan keterampilan menulis, diskusi buku, serta kegiatan edukatif berbasis komunitas. Keberadaan perpustakaan desa yang dekat dengan masyarakat secara geografis maupun sosial memberikan peluang besar untuk menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari pelajar hingga petani atau ibu rumah tangga. Dengan pengelolaan yang baik dan pemberdayaan yang terarah, perpustakaan desa mampu menjadi motor penggerak transformasi literasi di tingkat akar rumput, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi, pengetahuan, dan pengembangan diri. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan mengembangkan potensi perpustakaan desa sebagai pusat literasi bahasa, agar perannya tidak sekadar simbolik sebagai tempat buku, tetapi benar-benar menjadi ruang hidup yang aktif mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal kemampuan berbahasa dan literasi secara menyeluruh.

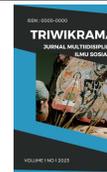
Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan saat ini adalah rendahnya tingkat literasi, khususnya literasi bahasa. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan mengembangkan bahasa secara baik dan benar tidak hanya berdampak pada lemahnya komunikasi sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Literasi bahasa yang lemah sering kali menjadi akar dari berbagai kesenjangan informasi, kesulitan dalam menyerap program pembangunan, serta terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Ironisnya, di tengah kompleksitas tantangan tersebut, banyak perpustakaan desa yang belum diberdayakan secara maksimal. Padahal, perpustakaan desa memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran masyarakat dan penggerak budaya literasi, termasuk dalam pengembangan kemampuan berbahasa.

Namun kenyataannya, masih banyak perpustakaan desa yang hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku tanpa program yang aktif, kurangnya tenaga pengelola yang kompeten, minimnya koleksi bahan bacaan yang relevan dan menarik, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang diadakan. Situasi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perpustakaan desa dapat diberdayakan secara optimal sebagai pusat literasi bahasa. Penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga untuk menggali strategi, pendekatan, dan model pemberdayaan yang efektif sehingga perpustakaan desa benar-benar dapat menjadi ruang belajar yang hidup, inklusif, dan memberdayakan masyarakat dalam aspek literasi bahasa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan literasi di tingkat desa dan menjadi referensi dalam penguatan peran perpustakaan desa sebagai agen transformasi sosial berbasis bahasa.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep Literasi Bahasa**

Literasi bahasa merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan kehidupan sosial yang mencerminkan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, menginterpretasikan, serta mengomunikasikan informasi secara efektif melalui bahasa. Literasi bahasa tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan berbicara, mendengarkan, serta berpikir kritis dan reflektif terhadap teks yang dibaca atau didengar. Kemampuan ini menjadi dasar penting dalam membentuk pola pikir rasional dan pemahaman terhadap dunia sosial budaya, politik, serta ekonomi. Dengan demikian, literasi



---

bahasa menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang melek informasi dan mampu berkomunikasi secara produktif.

Dalam konteks pendidikan formal, literasi bahasa memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sarana utama dalam proses pembelajaran lintas mata pelajaran. Siswa yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan lebih mudah memahami isi pelajaran, menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan, serta mampu menyaring informasi secara kritis. Oleh sebab itu, literasi bahasa menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pendidikan secara umum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan literasi bahasa harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Literasi bahasa bukan hanya aspek akademik, melainkan juga berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kerja, kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat menentukan kualitas interaksi antarindividu maupun antarlembaga. Di lingkungan sosial, literasi bahasa membantu seseorang memahami pesan dalam berbagai konteks budaya dan sosial, serta menyampaikan gagasan dan opini secara santun dan bijaksana. Literasi bahasa juga membentuk karakter pribadi yang mampu berpikir reflektif dan empatik dalam menyikapi perbedaan.

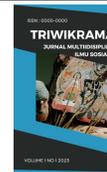
Di era digital, konsep literasi berkembang menjadi lebih kompleks, mengingat derasnya arus informasi yang masuk melalui berbagai media digital. Literasi bahasa harus bersinergi dengan literasi digital, yaitu kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara tepat guna. Pengguna internet, khususnya generasi muda, dihadapkan pada tantangan untuk membedakan informasi yang valid dan hoaks, memahami gaya bahasa digital, serta menyampaikan pendapat melalui platform digital secara bertanggung jawab. Hal ini menuntut adanya integrasi antara kemampuan bahasa dan literasi media.

Manurung et al. (2025) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dan komunikasi digital secara tepat dan etis tidak hanya sebatas akses terhadap teknologi. Dalam konteks bahasa Indonesia, literasi digital melibatkan penguasaan berbagai ragam dan register bahasa digital seperti emoji, singkatan, serta gaya informal dalam media sosial. Hal ini menuntut individu untuk mampu memilih dan menerapkan ragam bahasa yang sesuai dengan konteks: formal atau non-formal, pengiriman pesan pribadi, maupun publikasi daring

Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, membaca, dan menulis. Munculnya platform sosial media, blog, dan forum diskusi digital memberikan ruang baru bagi praktik literasi bahasa. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan, seperti kecenderungan menulis dengan ejaan yang tidak baku, penyebaran ujaran kebencian, serta penyampaian pendapat yang minim etika. Oleh karena itu, literasi bahasa di era digital harus menekankan pada pentingnya berpikir kritis, etika komunikasi, dan penggunaan bahasa yang santun.

Salah satu tantangan dalam membina literasi bahasa di era digital adalah menurunnya minat membaca teks panjang. Generasi muda cenderung lebih menyukai konten visual dan audiovisual yang bersifat cepat konsumsi. Padahal, membaca teks panjang dengan struktur argumentasi yang kompleks sangat penting untuk mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis. Oleh karena itu, penguatan literasi membaca harus tetap menjadi prioritas dalam pendidikan, meskipun harus disesuaikan dengan karakter media digital.

Literasi bahasa digital juga mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dalam berbahasa, seperti penggunaan emoji, singkatan internet, serta gaya bahasa informal yang berkembang pesat. Meski hal ini memperkaya variasi ekspresi bahasa, namun juga berpotensi mengaburkan makna dan mengurangi kejelasan komunikasi, terutama jika digunakan di ranah akademik atau



---

profesional. Maka dari itu, pemahaman terhadap register atau ragam bahasa yang tepat di setiap konteks perlu ditekankan dalam pendidikan literasi bahasa.

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran berbasis literasi bahasa harus dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual dan bermakna. Guru tidak hanya mengajarkan struktur bahasa dan kaidah kebahasaan, tetapi juga mengarahkan siswa untuk mampu menggunakan bahasa dalam berbagai situasi nyata, termasuk di ruang digital. Siswa perlu diajak menganalisis teks, menulis refleksi, menyampaikan argumentasi dalam forum daring, serta mengkritisi informasi yang diterima dari media digital. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat belajar menuangkan ide-ide mereka ke dalam suatu kalimat yang jelas dan terstruktur serta meningkatkan kemampuan membaca dan memperkaya kosakata yang mereka miliki. Implementasi literasi digital tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, namun bagi guru adanya literasi digital dapat membantu proses pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan (Hisnahan & Fradana, 2024).

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan akses yang luas terhadap bahan bacaan digital yang bermutu. Perpustakaan digital dan platform e-learning menjadi sarana penting dalam mendukung pengembangan literasi bahasa di era digital. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan yang literat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Partisipasi aktif orang tua dalam membimbing anak menggunakan bahasa secara tepat di media sosial juga merupakan bagian dari penguatan literasi bahasa.

Literasi bahasa juga erat kaitannya dengan pembentukan karakter bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang digital mencerminkan identitas nasional dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Sayangnya, saat ini banyak pengguna media sosial yang lebih memilih menggunakan bahasa asing atau bahasa campuran dalam berkomunikasi digital, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan posisi bahasa nasional. Oleh karena itu, literasi bahasa di era digital harus diiringi dengan upaya pelestarian dan penguatan bahasa Indonesia.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital, yaitu tidak meratanya akses terhadap teknologi informasi yang berdampak pada ketimpangan literasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap internet atau perangkat digital akan kesulitan mengikuti perkembangan literasi digital. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemerataan akses, pelatihan teknologi, dan penyediaan konten edukatif dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dengan demikian, literasi bahasa di era digital bukan hanya kebutuhan pendidikan, tetapi juga kebutuhan sosial dan kultural. Kemampuan memahami dan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks digital akan menentukan kualitas interaksi sosial, partisipasi warga dalam demokrasi digital, serta keberhasilan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Literasi bahasa yang kuat akan membekali generasi muda untuk menjadi pribadi yang cerdas, kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi arus informasi global.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep fundamental dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan mengandung makna pemberian kuasa kepada masyarakat agar mereka dapat mengendalikan sumber daya serta mengoptimalkan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya memperbaiki



---

kondisi material masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial dan politik.

Proses pemberdayaan masyarakat umumnya melibatkan peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam bentuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya yang penting seperti informasi, teknologi, dan modal. Hal ini bertujuan untuk membentuk kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan juga menuntut adanya peningkatan kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan kemampuan untuk melakukan advokasi atas hak-hak mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan proses yang menumbuhkan daya tahan sosial dan politik dalam masyarakat agar mereka mampu beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan.

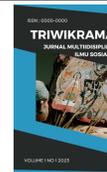
Selain itu, pemberdayaan masyarakat menempatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi ini bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku yang terlibat secara penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan. Partisipasi ini sangat penting agar program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta dapat diterima dan dijaga keberlanjutannya oleh masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan dapat menghasilkan transformasi sosial yang bermakna, di mana masyarakat memperoleh kemampuan dan kontrol atas sumber daya serta proses pembangunan.

Konsep pemberdayaan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil. Sinergi antara pihak-pihak ini dapat memperkuat dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk masyarakat yang diberdayakan. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dan regulator, yang menciptakan kebijakan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama yang mengimplementasikan program-program pemberdayaan. Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip saling menghormati, transparansi, dan akuntabilitas agar tercipta hubungan yang produktif dan berkelanjutan.

Ambarsari (2022) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan komunitas memungkinkan warga menjadi subjek utama dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek. Strategi ini mencakup peningkatan kesadaran warga terhadap pentingnya peran kolektif, penguatan kapasitas lokal berupa pengetahuan dan modal, serta dukungan fasilitasi pemerintah desa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti minimnya partisipasi, kurangnya modal serta dukungan pendampingan dari pemerintah desa yang masih terbatas, sehingga rekomendasi diarahkan pada optimalisasi peran desa dan pendamping dalam membangun ekosistem berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan lokal, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial. Dengan memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat, pemberdayaan membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Hal ini berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Pemberdayaan juga memupuk rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan mendorong keberlanjutan.

Namun, dalam praktiknya pemberdayaan masyarakat menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya, rendahnya kapasitas masyarakat, serta adanya struktur sosial yang tidak mendukung partisipasi aktif semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan



---

disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan agar tidak menimbulkan ketergantungan baru, melainkan meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat.

### 3. Perpustakaan

Perpustakaan sejak dahulu telah menjadi pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya yang sangat penting bagi perkembangan intelektual individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga sebagai jantung dari proses belajar, riset, dan pengembangan diri. Dalam konteks lembaga pendidikan, perpustakaan adalah elemen pendukung utama dalam penyediaan sumber referensi dan bahan ajar yang relevan serta terpercaya. Keberadaan perpustakaan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk tumbuhnya budaya literasi dan berpikir kritis.

Kondisi perpustakaan saat ini mengalami berbagai dinamika yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku masyarakat, serta kebijakan pengelolaan yang ada. Secara umum, perpustakaan masih memegang peranan penting sebagai pusat informasi dan literasi, namun menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan fungsi dan relevansinya di tengah era digitalisasi (Nugroho, S., & Prasetyo, H, 2021).

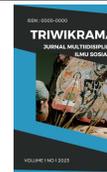
Dalam konteks di desa, Bahaudin & Wasisto (2023) mengemukakan bahwa perpustakaan memainkan peran kunci sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat, mengoptimalkan fungsinya melalui pendampingan dan pengaturan koleksi yang relevan dengan kebutuhan warga desa: sebagai hasilnya, perpustakaan ini membantu meningkatkan kemampuan membaca, literasi informasi, serta mendorong warga untuk mengambil inisiatif solusi terhadap isu lokal menunjukkan bahwa perpustakaan desa mampu menjadi motor pemberdayaan sosial dan budaya berkelanjutan

Namun, memasuki era digital, peran dan wajah perpustakaan mulai mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk penyebaran informasi yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses secara daring. Konsekuensinya, perpustakaan konvensional mulai ditantang untuk beradaptasi. Pengguna tidak lagi sepenuhnya mengandalkan koleksi fisik seperti buku cetak, melainkan lebih memilih e-book, jurnal elektronik, dan sumber-sumber digital lainnya yang dapat diakses dari mana saja. Hal ini mengharuskan perpustakaan untuk melakukan transformasi digital agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Transformasi digital pada perpustakaan tidak hanya sebatas pada pengadaan koleksi digital, tetapi juga menyangkut pembaruan sistem manajemen perpustakaan, pelatihan pustakawan yang kompeten dalam teknologi informasi, serta pengembangan layanan berbasis internet seperti katalog daring, peminjaman digital, hingga konsultasi literasi informasi secara online. Meskipun perubahan ini membuka banyak peluang, di sisi lain perpustakaan menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak sederhana untuk diatasi, terutama di negara-negara berkembang.

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai di banyak perpustakaan, terutama di wilayah pedesaan dan lembaga pendidikan kecil. Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, keterbatasan perangkat keras, dan sistem perangkat lunak yang belum terintegrasi menjadi hambatan besar dalam penerapan perpustakaan digital. Selain itu, minimnya dukungan dari institusi terkait baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan juga memperparah situasi.

Permasalahan lainnya muncul dari aspek sumber daya manusia, yaitu kurangnya pustakawan yang memiliki kemampuan literasi digital dan teknologi informasi. Banyak pustakawan masih terpaku pada paradigma lama dalam mengelola koleksi dan layanan



---

perpustakaan. Transformasi digital menuntut mereka untuk mampu mengelola basis data, metadata, e-resources, bahkan melakukan pengajaran literasi informasi berbasis teknologi. Sayangnya, pelatihan dan pengembangan kompetensi pustakawan sering kali masih sangat terbatas.

Selain itu, perpustakaan juga menghadapi tantangan dalam membangun koleksi digital yang memadai dan relevan. Biaya lisensi untuk jurnal elektronik atau e-book sering kali cukup mahal, dan tidak semua perpustakaan mampu membelinya. Hal ini membuat perpustakaan kecil atau sekolah yang dananya terbatas mengalami kesulitan dalam menyediakan koleksi digital yang berkualitas. Tanpa koleksi yang memadai, perpustakaan akan sulit menarik minat pengguna di era yang serba digital ini.

Kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pengguna, terutama generasi muda, lebih terbiasa mencari informasi melalui mesin pencari seperti Google tanpa memverifikasi validitas sumber yang digunakan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya minat untuk mengakses perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya. Tantangan ini menuntut perpustakaan untuk berinovasi dalam promosi literasi informasi dan memperkenalkan cara berpikir kritis kepada pengguna.

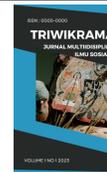
Masalah berikutnya adalah perubahan persepsi terhadap perpustakaan itu sendiri. Di era digital, banyak orang menganggap bahwa perpustakaan sudah tidak lagi relevan karena semua informasi dianggap bisa ditemukan di internet. Pandangan ini memperlemah eksistensi perpustakaan, terutama jika institusi tidak melakukan reposisi dan transformasi secara strategis. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan rebranding, bukan hanya sebagai tempat buku, tetapi sebagai pusat informasi, literasi, riset, dan inklusi digital.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara teknologi dan manajemen perpustakaan yang adaptif. Perpustakaan harus mulai menerapkan teknologi cloud untuk penyimpanan data, sistem manajemen informasi terintegrasi, serta menerapkan prinsip open access agar pengguna lebih mudah mendapatkan informasi ilmiah secara bebas. Upaya ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan keterampilan digital bagi pustakawan dan pengguna melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Perpustakaan dapat berevolusi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Di dalam perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi buku, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan TIK dan *capacity building*, sehingga berhasil meningkatkan literasi digital, memperluas wawasan, dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif. Peran perpustakaan di era digital juga sangat penting dalam menjaga integritas informasi. Dengan maraknya hoaks dan informasi palsu di media sosial, perpustakaan harus menjadi garda terdepan dalam memverifikasi informasi dan menyediakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai agen literasi informasi yang sangat vital di tengah banjirnya data dan informasi digital (Narendra, et al., 2024).

Selain itu, perpustakaan perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, penerbit digital, dan penyedia platform teknologi, guna mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Melalui kerja sama tersebut, perpustakaan dapat memperluas layanan, menekan biaya pengadaan, dan meningkatkan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, perpustakaan bukanlah institusi yang ditinggalkan zaman, tetapi institusi yang harus terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan adaptasi, inovasi, dan dukungan yang kuat, perpustakaan akan tetap relevan



---

sebagai pusat peradaban, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penunjang kehidupan literasi masyarakat digital.

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami dan mendeskripsikan secara mendalam realitas sosial di lapangan mengenai pemberdayaan perpustakaan desa sebagai pusat literasi bahasa bagi masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan yang secara sosial dan geografis merepresentasikan kondisi masyarakat pedesaan yang masih menghadapi tantangan dalam pengembangan literasi bahasa. Fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana peran perpustakaan desa dijalankan serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan literasi bahasa melalui fasilitas tersebut.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman. Tahapan analisis ini mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memilih data-data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif yang menguraikan hasil temuan lapangan secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan dan analisis data berlangsung, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan pemberdayaan perpustakaan desa sebagai pusat literasi bahasa.

### D. Pembahasan

Pembangunan perpustakaan di desa-desa melalui inisiatif pemerintah desa menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam mendorong keberadaan perpustakaan sebagai pusat belajar dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Inisiatif ini penting karena desa merupakan wilayah yang seringkali masih minim akses terhadap fasilitas pendidikan dan literasi formal yang memadai. Dengan adanya perpustakaan desa, masyarakat mendapat peluang lebih besar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara mandiri.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Penyelenggaraan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang memuat ketentuan rinci mengenai pendirian dan penyelenggaraan Perpustakaan Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 ini tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya, dan memiliki budaya literasi yang kuat melalui perluasan akses terhadap informasi, ilmu pengetahuan, serta bahan bacaan yang berkualitas dan merata hingga ke tingkat desa. Perpustakaan desa sendiri merupakan sarana strategis dalam mewujudkan wahana pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, latar belakang sosial, atau tingkat pendidikan. Dalam perda ini ditegaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai pusat pendidikan, pelestarian, informasi, penelitian, dan rekreasi yang mendukung peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.



Oleh karena itu, keberadaan Perpustakaan Desa bukan hanya menjadi pelengkap infrastruktur, tetapi menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Setiap desa diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan pemberian insentif bagi pengelola sebagai bentuk komitmen pembangunan sumber daya manusia yang unggul di daerah. Selain itu, Perpustakaan Desa juga menjadi bagian dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yakni sebuah pendekatan layanan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa melalui pengembangan potensi lokal dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan landasan ini, pendirian Perpustakaan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan sekadar kewajiban administratif melainkan bagian integral dari visi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan budaya baca, akses ke informasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

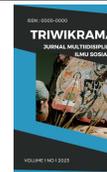
Proses pendirian perpustakaan desa biasanya dimulai dari perencanaan yang melibatkan musyawarah desa dan partisipasi aktif warga. Pemerintah desa bertugas menyediakan anggaran dan fasilitas dasar yang diperlukan, termasuk ruang perpustakaan yang representatif, koleksi buku, serta tenaga pengelola yang kompeten. Anggaran ini biasanya berasal dari dana desa yang dialokasikan khusus untuk pengembangan fasilitas pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Keberpihakan pemerintah desa dalam hal ini menjadi faktor utama keberhasilan pendirian perpustakaan yang berkelanjutan.

Selain penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah desa juga berperan dalam mendorong pengelolaan perpustakaan yang profesional. Para pengelola perpustakaan desa biasa diberikan pelatihan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar mampu mengelola koleksi, menjalankan program literasi, dan memberikan layanan informasi yang efektif kepada masyarakat. Pelatihan ini penting untuk menjawab tantangan minimnya tenaga perpustakaan yang terampil di tingkat desa. Dengan manajemen yang baik, perpustakaan desa diharapkan dapat menjadi tempat yang nyaman dan menarik untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Dalam banyak kasus, pemerintah desa juga sebenarnya bisa menggandeng lembaga pendidikan dan komunitas lokal untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Kerja sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan literasi seperti baca bersama, pelatihan menulis, dan diskusi kelompok yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan juga pusat pengembangan kemampuan literasi yang dinamis dan kontekstual sesuai kebutuhan warga desa.

Salah satu tantangan dalam pembangunan perpustakaan desa adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi dana maupun tenaga. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal serta menggalang bantuan dari pemerintah daerah, swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan kolaboratif ini membantu memperkuat keberlangsungan perpustakaan serta memperluas jangkauan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa.

Pentingnya perpustakaan desa yang dikelola dengan baik tidak hanya terbatas pada peningkatan literasi saja, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif. Dengan akses terhadap berbagai informasi, masyarakat desa dapat mengembangkan usaha kecil, meningkatkan kualitas pertanian, hingga memperluas wawasan tentang kesehatan dan pendidikan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan desa secara menyeluruh.



Selain itu, keberadaan perpustakaan desa turut memperkuat identitas budaya lokal. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pengumpulan dan pendokumentasian berbagai karya tulis, cerita rakyat, dan pengetahuan adat yang dimiliki masyarakat. Koleksi ini kemudian dapat dijadikan bahan bacaan dan riset yang memperkaya wawasan warga sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya yang khas dari desa tersebut.

Pemerintah desa juga perlu mendorong perpustakaan desa untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penyediaan fasilitas teknologi informasi seperti komputer dan akses internet memungkinkan perpustakaan memberikan layanan yang lebih modern dan relevan, seperti akses ke bahan bacaan digital dan pelatihan literasi digital. Hal ini menjadi penting agar perpustakaan desa tidak tertinggal dalam era informasi yang serba cepat. Wicaksono, E., & Rahman, T. (2022) mengatakan perpustakaan saat ini harus mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelayanannya agar tetap relevan. Digitalisasi koleksi dan penyediaan akses e-book, jurnal elektronik, serta basis data online menjadi kebutuhan utama agar perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks dan cepat.

Program-program literasi yang digagas pemerintah desa melalui perpustakaan juga harus dirancang secara inklusif. Hal ini berarti layanan perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pemerintah desa bertanggung jawab memastikan bahwa perpustakaan memberikan ruang yang ramah dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok ini.

Keberlanjutan perpustakaan desa juga bergantung pada dukungan aktif dari masyarakat. Pemerintah desa harus membangun kesadaran dan semangat gotong royong warga untuk turut serta menjaga dan mengembangkan perpustakaan. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, perpustakaan desa dapat menjadi pusat kegiatan sosial yang hidup, tempat belajar bersama, dan ruang kreatif yang produktif bagi warga.

Evaluasi berkala terhadap kinerja perpustakaan desa juga sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya menunggu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah perpustakaan sudah memenuhi tujuan peningkatan literasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika ditemukan kendala, maka langkah perbaikan dan pengembangan program dapat segera diambil agar perpustakaan desa terus memberikan manfaat maksimal.

Secara keseluruhan, dibuatnya perpustakaan di desa-desa oleh pemerintah desa merupakan langkah fundamental untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan dan informasi. Perpustakaan desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat literasi bahasa, tetapi juga sebagai ruang sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Dengan dukungan penuh dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, perpustakaan desa dapat menjadi pilar utama dalam membangun desa yang cerdas, berdaya, dan mandiri.

Namun, di era digital saat ini, perpustakaan desa menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat mengubah cara masyarakat mengakses informasi, sementara perpustakaan desa sering kali tertinggal dalam mengikuti perkembangan tersebut. Ketimpangan ini menyebabkan perpustakaan desa sulit bersaing dengan platform digital yang menawarkan informasi lebih cepat dan mudah diakses.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi perpustakaan desa adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak perpustakaan desa belum memiliki perangkat komputer, akses internet yang stabil, atau bahkan listrik yang memadai. Kondisi ini menyebabkan perpustakaan tidak mampu menyediakan layanan berbasis digital seperti e-book, jurnal daring, atau katalog



---

online. Akibatnya, perpustakaan menjadi kurang relevan di mata generasi muda yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital dan internet.

Selain keterbatasan teknologi, perpustakaan desa juga kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan digital. Petugas perpustakaan di desa umumnya belum terlatih dalam hal digitalisasi koleksi, penggunaan software manajemen perpustakaan, maupun promosi layanan melalui media sosial. Hal ini tentu saja menekankan perlunya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah atau instansi terkait membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Hal ini senada dengan yang disampaikan Fatimah, L., & Hadi, M. (2023) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa pengelolaan perpustakaan yang profesional juga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan fungsinya. Saat ini, masih ditemukan banyak perpustakaan yang dikelola secara tradisional tanpa adanya pembaruan dalam sistem manajemen dan layanan pelanggan, sehingga kurang mampu menarik minat pengguna baru. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan sangat mempengaruhi efektivitas program literasi dan pengembangan koleksi yang disediakan.

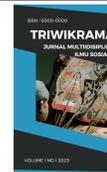
Permasalahan lainnya adalah kurangnya pembaruan koleksi bahan bacaan. Banyak perpustakaan desa hanya memiliki buku-buku lama dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ketika masyarakat dapat dengan mudah menemukan informasi terbaru di internet, perpustakaan desa yang tidak memperbarui koleksi menjadi semakin ditinggalkan. Ini memperkuat stigma bahwa perpustakaan desa hanyalah tempat menyimpan buku usang. Santika, R., & Dewi, S. (2021) memberikan analisisnya bahwa kondisi koleksi buku dan sumber informasi di perpustakaan juga harus bervariasi. Banyak perpustakaan yang koleksinya sudah usang dan kurang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga kurang diminati pengunjung. Pengadaan koleksi yang dinamis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna harus menjadi prioritas agar perpustakaan dapat menjadi pusat referensi yang *up-to-date* dan menarik bagi masyarakat luas.

Tidak adanya kebijakan yang tegas dan terstruktur dari pemerintah daerah atau pusat juga menjadi kendala tersendiri. Banyak perpustakaan desa berdiri tanpa adanya arah pengembangan yang jelas, baik dari segi anggaran, sumber daya, maupun pelatihan. Padahal, agar dapat berkembang di era digital, perpustakaan desa membutuhkan kebijakan yang mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Rendahnya kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya literasi juga menjadi tantangan besar. Putri, A. D., & Santoso, R. (2020) juga menemukan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah menurunnya minat baca masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih tertarik pada media digital dibandingkan dengan buku cetak. Banyak warga yang belum memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi atau tempat belajar. Mereka lebih memilih hiburan digital yang instan seperti media sosial atau video daring, dibandingkan membaca buku. Minimnya promosi dan edukasi tentang fungsi perpustakaan turut memperparah kondisi ini.

Dalam konteks digitalisasi, perpustakaan desa juga dihadapkan pada isu kurangnya koleksi digital. Tidak semua buku cetak di perpustakaan tersedia dalam bentuk digital, dan proses digitalisasi memerlukan biaya dan keahlian khusus. Hal ini menyulitkan perpustakaan desa untuk memberikan layanan daring yang setara dengan perpustakaan kota atau universitas yang lebih maju.

Ketergantungan pada anggaran dana desa yang terbatas juga menghambat pengembangan perpustakaan di era digital. Dana desa seringkali lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, sehingga perpustakaan tidak menjadi prioritas utama.



---

Tanpa pendanaan yang memadai, pengembangan layanan digital dan pengadaan perangkat teknologi tidak bisa dilakukan secara optimal. Tidak adanya sistem evaluasi dan monitoring terhadap kinerja perpustakaan desa juga menjadi masalah tersendiri. Tanpa evaluasi, pemerintah desa tidak mengetahui sejauh mana perpustakaan memberikan dampak positif bagi masyarakat atau apakah layanan yang diberikan sudah efektif. Hal ini membuat perpustakaan desa sering dikelola secara stagnan tanpa adanya upaya peningkatan mutu layanan.

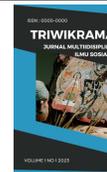
Permasalahan keamanan data dan kurangnya pemahaman tentang perlindungan informasi digital juga mulai menjadi isu di era digital. Jika perpustakaan desa mulai mengadopsi layanan daring, maka harus ada pemahaman tentang pengelolaan informasi pribadi pengguna, sistem keamanan jaringan, dan etika digital. Kurangnya literasi digital di kalangan pengelola dan pengguna menjadi risiko tersendiri dalam transformasi layanan perpustakaan.

Di tengah tantangan tersebut, peran dukungan eksternal sangat dibutuhkan, seperti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Perguruan Tinggi, dan komunitas literasi. Namun, kerja sama ini belum banyak dimanfaatkan oleh perpustakaan desa karena terbatasnya jaringan dan komunikasi. Akibatnya, perpustakaan desa kerap berjuang sendiri tanpa panduan atau dukungan teknis dalam upaya menghadapi era digital.

## **E. Kesimpulan**

Pembangunan perpustakaan desa merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan, terutama melalui penguatan budaya literasi dan pemerataan akses informasi. Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022, terlihat bahwa pemerintah daerah memandang perpustakaan desa bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan sebagai pusat kegiatan belajar sepanjang hayat yang inklusif dan partisipatif. Perpustakaan desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan bacaan, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial, pelestarian budaya lokal, dan sarana pengembangan potensi individu maupun komunitas. Pemerintah desa, melalui alokasi anggaran dan pengelolaan yang terencana, memiliki peran penting dalam mendirikan serta menjaga keberlanjutan layanan perpustakaan. Pelibatan masyarakat secara aktif, kolaborasi dengan komunitas, dan dukungan dari instansi lain juga menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan perpustakaan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan desa.

Namun demikian, transformasi perpustakaan desa menghadapi tantangan serius, terutama dalam menghadapi era digital yang menuntut pembaruan sistem dan pendekatan layanan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti minimnya komputer, jaringan internet, dan sistem manajemen berbasis digital, menyebabkan perpustakaan desa tertinggal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang sudah akrab dengan akses informasi instan. Tidak hanya itu, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di bidang literasi digital, pengelolaan koleksi, dan promosi layanan juga menjadi hambatan serius. Banyak perpustakaan desa masih dikelola secara tradisional, tanpa inovasi dan pembaruan koleksi, sehingga menjadi kurang relevan di mata generasi muda. Selain itu, tidak adanya kebijakan terpadu dari pemerintah daerah atau pusat tentang transformasi digital perpustakaan, serta minimnya evaluasi terhadap dampaknya, menyebabkan layanan perpustakaan desa berkembang secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya minat baca masyarakat, serta anggapan bahwa perpustakaan hanyalah tempat menyimpan buku lama yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini.



Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan komitmen serius dan pendekatan kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah desa harus mampu merancang program literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal serta perkembangan zaman. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas teknologi informasi, dan pengadaan koleksi yang relevan merupakan prioritas utama dalam modernisasi perpustakaan desa. Selain itu, perlu dijalin kemitraan yang aktif dengan Dinas Perpustakaan, lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan dan efektivitas layanan perpustakaan. Literasi digital, perlindungan informasi pengguna, serta promosi budaya baca harus menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan perpustakaan desa. Dengan pendekatan yang terencana, kolaboratif, dan partisipatif, perpustakaan desa akan mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat pedesaan, sekaligus menjadi simbol kemajuan dan kemandirian desa di era digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, R., Dewi, R. K., & Darmadja, S. (2022). *Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(6), 630-637.
- Bahaudin, M. S., & Wasisto, J. (2023). *Peran perpustakaan desa "Pelita" dalam pemberdayaan masyarakat Desa Muntang. Jurnal Ilmu Perpustakaan, undip, 2023*.
- Fatimah, L., & Hadi, M. (2023). *Pengelolaan Perpustakaan Modern: Strategi dan Tantangan. Jurnal Manajemen Perpustakaan*, 11(1), 50-65.
- Hisanah, N., & Nurefendi, A. F. (2024). *Analisis penerapan literasi digital untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2).
- Manurung, E. P. N., Manik, J. L. K., Sibuea, G. S., & Surip, M. (2025). *Dinamika Bahasa Indonesia di era digital: Antara perkembangan linguistik dan tantangan preservasi. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(2).
- Narendra, A. P., Lestari, E. S., Wibawa, A. et al. (2024). *Transformasi Perpustakaan Umum Gunungkidul Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi. Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 10(1).
- Nugroho, S., & Prasetyo, H. (2021). *Peran Perpustakaan di Era Digital: Tantangan dan Peluang. Jurnal Informasi dan Perpustakaan*, 7(1), 15-27.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Putri, A. D., & Santoso, R. (2020). *Perubahan Perilaku Membaca Generasi Milenial dan Implikasinya terhadap Perpustakaan. Jurnal Literasi dan Media*, 4(2), 45-58.
- Santika, R., & Dewi, S. (2021). *Relevansi Koleksi Perpustakaan dengan Kebutuhan Pengguna. Jurnal Kajian Perpustakaan*, 6(4), 73-85.
- Wicaksono, E., & Rahman, T. (2022). *Digitalisasi Koleksi dan Akses Informasi di Perpustakaan Umum. Jurnal Teknologi Informasi dan Perpustakaan*, 9(3), 100-112.